

Isu Politik dan Identitas Sosial: Respons Emosional Masyarakat terhadap Tuduhan Kepalsuan Ijazah Presiden

Aisyah Mawar Jingga Situngkir¹, Rizal Kurniawan²
Universitas Negeri Padang^{1,2}

*Email Korespodensi: jinggaaa.s@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 13-07-2026
Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

This study aims to examine public emotional responses to the allegations of President Joko Widodo's forged academic diploma and to explore the role of social-political identity in shaping these perceptions. A descriptive qualitative approach was employed, involving 251 respondents aged 18 years and above who were eligible to vote. Data were collected through an online open-ended questionnaire distributed via Google Forms and analyzed using coding techniques and thematic analysis. The findings indicate that public responses to the issue are influenced by social-political identity, trust in government institutions, media exposure, and emotional attachment to political figures. Respondents who believed the allegations generally expressed distrust toward the government, suspicion regarding the authenticity of official documents, and were influenced by media coverage or political figures. In contrast, respondents who rejected the allegations based their views on factual evidence, logical reasoning, trust in governmental institutions, and official clarifications. From an emotional perspective, participants exhibited a range of responses, including anger, disappointment, anxiety, confusion, as well as neutral and apathetic attitudes. These findings suggest that public perceptions of political issues are shaped not only by factual information but also by group identity and emotional dynamics within a politically polarized society. This study contributes to the field of political psychology by highlighting the importance of understanding the interaction between social identity, emotions, and political attitude formation in responding to controversial political issues.

Keywords: political psychology, social identity, political emotions, political polarization, public perception.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons emosional masyarakat terhadap isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo serta mengkaji peran identitas sosial-politik dalam membentuk persepsi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 251 responden berusia 18 tahun ke atas yang telah memiliki hak suara. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang disebarluaskan secara daring menggunakan Google Form, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengkodean (coding) dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap isu tersebut dipengaruhi oleh identitas sosial-politik, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, paparan media, serta keterikatan emosional terhadap tokoh politik. Responden yang mempercayai isu cenderung didorong oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah, kecurigaan terhadap dokumen, dan pengaruh media atau tokoh politik. Sebaliknya, responden yang tidak mempercayai isu mendasarkan pandangannya pada bukti, logika, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, serta klarifikasi resmi. Dari aspek emosional, ditemukan beragam respons, mulai dari marah, kecewa, cemas, bingung, hingga sikap netral dan apatis. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap isu politik tidak hanya dibentuk oleh fakta, tetapi juga oleh identitas kelompok

dan emosi yang berkembang dalam masyarakat yang terpolarisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian psikologi politik dengan menegaskan pentingnya memahami interaksi antara identitas sosial, emosi, dan pembentukan sikap politik dalam menyikapi isu-isu politik yang kontroversial.

Kata kunci: psikologi politik, identitas sosial, emosi politik, polarisasi politik, persepsi publik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jingga Situngkir, A. M., & Kurniawan, R. . (2026). Isu Politik dan Identitas Sosial: Respons Emosional Masyarakat terhadap Tuduhan Kepalsuan Ijazah Presiden. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 8116-8121. <https://doi.org/10.63822/jhef2g23>

PENDAHULUAN

Di tengah arus informasi yang sangat cepat dalam era digital saat ini, masyarakat semakin sering dihadapkan pada isu-isu politik yang tidak selalu jelas validitasnya. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah tuduhan terkait pemalsuan ijazah yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Isu ini tidak hanya menjadi bahan diskusi politik, tetapi juga memicu berbagai reaksi emosional dari masyarakat. Bukan hanya persoalan hukum atau dokumen administratif semata, tuduhan tersebut berkembang menjadi simbol konflik identitas dan polarisasi dalam masyarakat.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bahwa sikap publik terhadap isu-isu politik tidak semata-mata dipengaruhi oleh data atau fakta objektif. Justru, respons masyarakat sering kali sangat bergantung pada hubungan identitas sosial mereka dengan tokoh politik tertentu. Dalam hal ini, teori identitas sosial dari Tajfel dan Turner (1979) menjelaskan bahwa individu cenderung mengelompokkan diri secara psikologis ke dalam kategori sosial tertentu, seperti kelompok politik. Ketika seorang tokoh politik menjadi representasi dari identitas kelompok tersebut, segala bentuk serangan terhadap tokoh itu akan dirasakan sebagai ancaman terhadap kelompoknya sendiri.

Tidak hanya identitas kelompok, dimensi afektif atau emosional juga berperan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat menyikapi isu politik. Dalam kerangka teori Affective Intelligence yang dikembangkan oleh Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000), dijelaskan bahwa emosi seperti rasa takut, marah, dan jenuh dapat mempengaruhi cara individu memproses informasi politik dan membentuk sikapnya. Isu dugaan pemalsuan ijazah ini, misalnya, menimbulkan perasaan jengkel dan muak di kalangan masyarakat yang merasa isu tersebut tidak berdasar dan hanya dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menjatuhkan citra pemimpin yang mereka dukung.

Selain itu, konteks polarisasi politik yang semakin tajam juga memberikan kontribusi besar terhadap cara masyarakat menerima dan merespons informasi. Iyengar dan Westwood (2015) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi secara ideologis, loyalitas politik menjadi identitas sosial yang kuat, bahkan lebih dominan daripada identitas lainnya seperti etnis atau agama. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung mempercayai informasi yang mendukung kelompoknya dan menolak informasi yang berasal dari pihak lawan, tidak peduli seberapa objektif data yang disampaikan. Maka dari itu, respons terhadap isu ijazah Presiden bukan hanya berkaitan dengan kebenaran faktual, melainkan juga refleksi dari posisi ideologis dan keterikatan emosional.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana masyarakat merespons isu pemalsuan ijazah Presiden Jokowi secara emosional, serta bagaimana identitas sosial-politik mereka membentuk reaksi tersebut. Dengan melibatkan 251 responden dari beragam latar belakang, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana emosi dan identitas berperan dalam membentuk opini dan sikap politik masyarakat terhadap isu yang menyentuh figur simbolik negara. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam studi psikologi politik, khususnya dalam memahami hubungan antara persepsi publik, emosi, dan dinamika politik identitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat menanggapi isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi dari sisi emosional dan identitas sosial-politik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri

pola-pola sikap, keyakinan, dan keterikatan sosial yang tidak dapat direpresentasikan dengan angka, melainkan harus dianalisis melalui narasi dan makna yang disampaikan responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket terbuka yang disebarakan secara daring melalui platform Google Form. Responden dipilih secara purposif dengan syarat utama yaitu sudah memiliki hak suara, atau minimal berusia 18 tahun ke atas. Strategi ini memungkinkan peneliti menjangkau individu yang telah terlibat atau memiliki kesadaran politik, serta aktif dalam menyerap dan merespons isu-isu publik melalui media sosial atau diskusi sehari-hari.

Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 251 responden yang membantu dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengisi kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini terdapat responden laki-laki sebanyak (46,6%) dan responden perempuan sebanyak (53,4%). Adapun rincian mengenai karakteristik responden adalah:

1. Berusia 18 tahun keatas
2. Sudah memiliki hak suara

Instrument penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan pertanyaan terbuka, yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas sesuai dengan pendapat, perasaan, dan pengalaman mereka masing-masing. Penggunaan kuesioner terbuka dianggap tepat karena dapat menggali respons yang lebih dalam dan variatif, terutama dalam konteks isu politik yang bersifat sensitif dan emosional. Menurut Arikunto (2010), kuesioner terbuka memberikan kebebasan bagi responden untuk menjelaskan jawabannya secara naratif tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban tertutup.

Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan metode pengkodean (coding). Pengkodean digunakan untuk menyusun data menjadi kelompok-kelompok bermakna yang kemudian dianalisis berdasarkan tema atau pola yang muncul. Proses ini dilakukan secara manual melalui aplikasi Microsoft Excel, yang digunakan untuk mengelompokkannya berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan sesuai dengan indikator penelitian. Kata kunci yang digunakan adalah sebagai berikut,

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi respons emosional masyarakat terhadap isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang disebarakan secara daring, yang memuat sejumlah pertanyaan reflektif terkait pandangan, keyakinan, dan perasaan partisipan terhadap isu tersebut. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara manual menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengkodean, dimulai dengan pembacaan mendalam terhadap kutipan-kutipan responden, kemudian pemberian label (kode) yang merepresentasikan makna utama dari tiap pernyataan. Kode-kode tersebut selanjutnya disusun ke dalam kategori dan tema-tema yang lebih luas berdasarkan kesamaan makna dan kecenderungan isi. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yang berfokus pada identifikasi pola-pola makna serta dinamika emosional dan sosial yang terkandung

dalam narasi responden. Interpretasi akhir dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritis psikologi politik, khususnya teori identitas sosial dan peran emosi dalam pembentukan sikap terhadap isu politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari tanggapan kualitatif masyarakat terhadap isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi, yang dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan pertanyaan terbuka. Data tersebut kemudian diorganisasikan dalam format *spreadsheet* dan terdiri atas beberapa bagian utama. Pertama, responden diminta menjawab pertanyaan awal berupa pilihan "Ya" atau "Tidak" terhadap keyakinan mereka mengenai kebenaran isu konspirasi ijazah palsu. Berdasarkan jawaban tersebut, pertanyaan lanjutan disesuaikan. Bagi responden yang menjawab "Ya", mereka diminta menjelaskan alasan di balik kepercayaan mereka terhadap kabar tersebut. Sebaliknya, bagi responden yang menjawab "Tidak", mereka diminta menguraikan alasan ketidakpercayaan mereka terhadap isu tersebut. Selain itu, setiap responden juga diminta untuk mengemukakan perasaan atau reaksi emosional mereka terhadap

keberadaan isu tersebut secara naratif. Bagian ini menjadi penting karena memuat dimensi afektif yang berkontribusi terhadap pemaknaan dan sikap politik individu.

Data yang telah terkumpul kemudian melalui proses pengkodean dalam dua tahap. Kolom "Coding 1" berisi hasil pengkodean awal terhadap narasi responden, yang menangkap makna kasar atau interpretasi permukaan. Sedangkan kolom "Coding 2" mencerminkan interpretasi lanjutan yang menggali makna lebih dalam atau mengaitkan dengan perspektif yang lebih luas, seperti kecenderungan ideologis, posisi terhadap sistem politik, atau bentuk identifikasi sosial. Hasil pengkodean ini kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama berdasarkan kesamaan pola makna dan isi naratif yang muncul dari tanggapan responden.

Hasil

Penelitian ini melibatkan 251 responden berusia 18 tahun ke atas yang telah memiliki hak suara, dan datanya diperoleh melalui kuesioner terbuka yang disebarakan secara daring. Responden diminta untuk menjawab secara naratif mengenai pandangan mereka terhadap isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, serta menggambarkan respons emosional mereka terhadap isu tersebut. Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan bahwa sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu ini sangat beragam, mencerminkan kompleksitas dalam cara mereka memaknai informasi politik yang beredar.

Sebagian responden menyatakan percaya bahwa tuduhan tersebut benar. Kelompok ini umumnya menyampaikan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, menaruh kecurigaan terhadap dokumen atau riwayat pendidikan Presiden, dan merasa terpengaruh oleh pemberitaan media maupun opini dari tokoh-tokoh politik. Narasi yang muncul dalam kelompok ini menunjukkan bahwa pandangan mereka lebih banyak dibentuk oleh kecurigaan terhadap kredibilitas institusi resmi serta keyakinan subjektif yang sering kali tidak didukung oleh bukti konkret. Sebaliknya, responden yang menyatakan tidak percaya terhadap isu ijazah palsu, cenderung memberikan alasan yang berpijak pada logika, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, serta klarifikasi resmi yang telah disampaikan kepada publik. Kelompok ini melihat isu tersebut sebagai bentuk propaganda atau strategi politik yang bertujuan untuk menjatuhkan citra Presiden, sehingga mereka tetap memegang kepercayaan pada verifikasi lembaga resmi seperti KPU.

Dari sisi emosional, data menunjukkan beragam respons. Sebagian responden menunjukkan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau cemas akibat maraknya isu tersebut. Ada pula yang merasa bingung atau tidak yakin bagaimana menyikapinya. Di sisi lain, sebagian responden justru bersikap netral, apatis, atau bahkan sangat yakin terhadap posisi yang mereka ambil, baik dalam mendukung maupun menolak isu tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan emosional masyarakat sangat kuat, dan bahwa emosi memainkan peran penting dalam pembentukan sikap politik terhadap isu yang sensitif dan simbolik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap isu tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fakta atau bukti yang tersedia, tetapi juga sangat ditentukan oleh identitas sosial-politik dan emosi individu. Identitas kelompok, seperti kedekatan dengan tokoh politik tertentu atau afiliasi ideologis, terbukti memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara seseorang menerima dan menafsirkan informasi politik. Dalam konteks ini, informasi yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh individu yang berbeda, tergantung pada posisi sosial dan politik mereka.

Emosi juga terbukti menjadi faktor penting dalam menentukan sikap masyarakat. Rasa marah, kecewa, takut, bahkan keyakinan penuh, menunjukkan bahwa isu ini telah melampaui sekadar perdebatan administratif dan menjadi bagian dari konflik identitas dan loyalitas kelompok. Dalam masyarakat yang mengalami polarisasi politik yang kuat, informasi tidak lagi diproses secara netral, melainkan melalui kacamata afiliasi kelompok dan emosi yang melekat padanya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dimensi psikologis dan sosial dari respons masyarakat terhadap isu politik, serta perlunya pendekatan interdisipliner, seperti psikologi politik, untuk mengungkap dinamika kompleks di balik sikap publik terhadap isu-isu kontroversial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and loathing across party lines: New evidence on group polarization. *American Journal of Political Science*, 59(3), 690–707. <https://doi.org/10.1111/ajps.12152>
- Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective intelligence and political judgment*. University of Chicago Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.